

**PERAN BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH
KOTA PADANG DALAM MENGATASI MASALAH KERUSAKAN
LINGKUNGAN AKIBAT PENAMBANGAN MINERAL NON LOGAM
JENIS CLAY DI KELURAHAN GUNUNG SARIK KECAMATAN
KURANJI KOTA PADANG**

(Roni Syahputra, BP : 1210113096, Hukum Administrasi Negara, PK VIII
Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2016, 78 Halaman)

ABSTRAK

Lingkungan hidup merupakan hal terpenting dalam kehidupan manusia yang mendukung berlangsungnya setiap aktivitas dan interaksi sosial yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Agar tidak terjadi kerusakan lingkungan hidup yang menyebabkan terganggunya aktivitas tersebut, maka dibutuhkan usaha untuk menjamin dan menjaga keutuhan lingkungan hidup yaitu perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah agar tidak terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan salah satunya diakibatkan oleh aktivitas penambangan. Di Kota Padang semakin banyak terdapat kegiatan penambangan seperti penambangan mineral non logam jenis clay di Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji yang mana berpengaruh terhadap lingkungan sekitar. Maka dari itu dibutuhkan peran dari pemerintah Kota Padang untuk menjaga dan mengatasinya, yang mana dilakukan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (yang selanjutnya disingkat BAPEDALDA). Penelitian ini mendeskripsikan mengenai peran BAPEDALDA Kota Padang dalam mengatasi masalah kerusakan lingkungan akibat penambangan mineral non logam jenis clay di Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji Kota Padang serta apa saja kendala yang dihadapi, yang di dalamnya juga mencakup upaya-upaya yang dilakukan oleh BAPEDALDA Kota Padang untuk mengatasi kendala tersebut. Pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah yuridis sosiologis, yang berdasarkan penelitian lapangan. Dari hasil penelitian lapangan yang dilakukan, peran BAPEDALDA dalam mengatasi kerusakan lingkungan akibat penambangan mineral non logam jenis clay di kawasan Gunung Sarik adalah pengawasan, pembinaan dan penegakan hukum. Kendala yang dihadapi BAPEDALDA dalam melakukan peran tersebut terdiri dari kendala yuridis dan kendala teknis. Untuk kendala teknis yaitu dari Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan adalah ketidaktaatan perusahaan dalam melaksanakan UKL-UPL, keterbatasan Tim Pengawas dan jadwal pengawasan serta keterbatasan anggaran, sedangkan dari Bidang Penegakan Hukum adalah kesulitan mengumpulkan penanggung jawab penambangan, koordinasi dan monitoring di lapangan terganggu. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan mengirimkan surat peringatan kepada perusahaan, mengajukan permohonan kepada Walikota Padang untuk penambahan jumlah Tim Pengawas, jadwal pengawasan dan anggaran pada tahun selanjutnya.

Kata Kunci : Peran BAPEDALDA, Kerusakan Lingkungan, Penambangan Clay